

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era otonomi daerah ini pemerintah daerah berusaha untuk mengatur roda pemerintahannya sendiri yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada era otonomi daerah ini, pemerintah daerah juga dituntut untuk mencari sumber dana secara mandiri dengan cara menggali potensi daerah yang dimiliki. Besarnya potensi yang dimiliki merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin dan biaya pembangunan daerah.

Maksud dari pengertian otonomi daerah otonom tersebut adalah agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah, dengan batas-batas kewenangan yang ada.

kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, merupakan salah satu segi atau kriteria penting untuk menilai secara nyata Kemampuan pembiayaan daerah. Tanpa adanya pembiayaan yang cukup, maka tidak mungkin suatu daerah secara optimal mampu menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta segala kewenangan yang melekat dengannya, untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri.

Pertumbuhan penduduk Kota Bandung saat ini sangat meningkat salah satu akibat dari tingginya perkebangan penduduk adalah bertambahnya volume dan berat sampah. Jika setiap orang menghasilkan Timbulan Sampah 0,5 kg/orang/hari, maka volume sampah yang dihasilkan Kota Bandung± 1500-1600 ton/hari.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bandung, masalah keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas jasa pelayanan kebersihan di Kota Bandung. Apabila kegiatan pelayanan pengelolaan dapat berjalan dengan baik maka dapat mempengaruhi Pendapatan asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu segi atau kriteria penting untuk menilai secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama daerah. PAD dapat bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD menjadi menarik karena PAD juga menjadi sumber penerimaan terbesar daerah, terutama bagi daerah yang memiliki potensi yang besar.

Retribusi menjadi menjadi salah satu penyumbang PAD yang cukup signifikan, Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Negara. Dalam penerapan retribusi akan terlihat bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas Negara yang digunakannya. Salah satu jenis retribusi yang cukup potensial adalah retribusi jasa

pelayanan kebersihan, dari beberapa fakta yang peneliti lihat penerimaan retribusi jasa pelayanan kebersihan mempunyai kendala dalam pelaksanaannya.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Retrisbusi Jasa Pelayanan Kebersihan
Kota Bandung tahun 2011-2016
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2011	21,385,694,000	14,864,029,450
2	2012	21,940,805,040	15,068,123,332
3	2013	22,703,979,000	18,693,657,274
4	2014	24,528,293,000	22,625,713,668
5	2015	25,102,473,948	24,366,619,375
6	2016	25,551,966,516	27,951,868,500

(Sumber: PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2016)

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa realisasi anggaran penerimaan retribusi jasa pelayanan kebersihan Kota Bandung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti pada tahun 2011 dari target sebesar Rp. 21,385,694,000 hanya sebesar Rp. 14,864,029,450. Pada tahun 2012 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 21,940,805,040 hanya tercapai sebesar Rp. 15,068,123,332. Kemudian pada tahun 2013 target sebesar Rp. 22,703,979,000 hanya tercapai Rp. 18,693,657,274. Pada tahun 2014 dari target Rp. 24,528,293,000 tercapai sebesar Rp. 22,625,713,668. Pada tahun 2015 Rp. 25,102,473,948 tercapai sebesar Rp. 24,366,619,375. Dan pada tahun 2016 Rp. 25,551,966,516 tercapai sebesar Rp. 27,951,868,500.

Persampahan merupakan instrumen kebijakan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengatur kesadaran individu-individu masyarakat akan pentingnya kebersihan baik di dalam lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan Kota, Pengelolaan sampah yang optimal merupakan suatu tantangan besar yang sekarang dihadapi hampir oleh seluruh kota besar di Indonesia, khususnya Kota Bandung. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan jumlah timbulan sampah yang terus meningkat.

Berkenaan dengan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada masalah tersebut dengan judul **“Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Pelayanan Kebersihan Di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung”**

B. Rumusan Masalah

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan. Sampah juga merupakan masalah utama kebersihan Kota Bandung, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis memandang perlu adanya pembatasan masalah yang didapatkan berdasarkan data dan fakta realisasi penerimaan retribusi jasa pelayanan kebersihan kota Bandung yang mengalami ketidaktercapaian target, teridentifikasi terdapat masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan retribusi jasa pelayanan kebersihan di Kota Bandung?

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerimaan retribusi jasa pelayanan kebersihan di Kota Bandung?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan penerimaan retribusi jasa pelayanan kebersihan di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi jasa pelayanan kebersihan di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerimaan retribusi jasa pelayanan kebersihan di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan penerimaan retribusi jasa pelayanan kebersihan di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah penerimaan retribusi daerah.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah Kota Bandung dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang, khususnya pada hal manajemen retribusi dan pelestarian lingkungan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, teori yang dijadikan *grand teori* adalah Keuangan Negara. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Middle Teori Retribusi daerah, Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Operational Teori yaitu retribusi Kebersihan, Retribusi sampah merupakan bagian dari retribusi jasa umum dimana retribusi jasa umum disini adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum. Pengelolaan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya.

Menurut Josef Riwu Kaho (2010:180) ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan retribusi adalah:

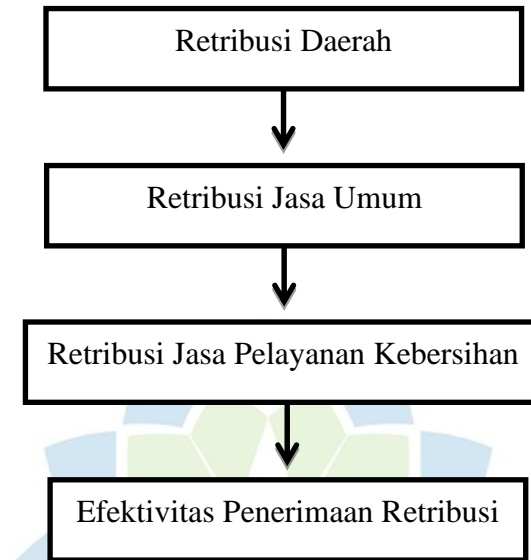
1. Pengetahuan tentang asas-asas organisasi.
2. Disiplin kerja yang tinggi.
3. Pengawasan yang efektif.

Retribusi kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan yang membuang langsung di TPA. Pemerintah Kota Bandung telah mempunyai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Besarnya retribusi yang tertuang oleh pribadi atau badan yang menggunakan jasa dan perizinan tertentu dihitung dengan mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang tertuang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

Berdasarkan pemahaman, teori-teori dan pendapat yang diuraikan di atas maka kerangka penelitian peneliti sajikan dalam bentuk kerangka pemikiran yang terlihat pada gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



(Sumber: Diolah oleh penulis, 2017)